

**Tindakan dan Varian Radikalisme Front Pembela Islam
(FPI) Mojokerto**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

M. Muji Buddin SM

13540034

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Muji Buddin SM
NIM : 13540034
Prodi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Alamat Rumah : Dsn. Grogol, Ds. Dukuhngarjo, Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto, Jawa Timur.
Alamat di Yogyakarta : Gg. Pedak Baru, Karangbendo, Kec. Banguntapan, Bantul.
Telp/CP : 085730032545
Judul : Tindakan dan Varian Radikalisme Front Pembela Islam (FPI) Mojokerto

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia *munaqosah* kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

Yang menyatakan



M. Muji Buddin SM

NIM: 13540034

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lampiran :

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr, wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : M. Muji Buddin SM
NIM : 13540034
Judul Skripsi : Tindakan dan Varian Radikalisme Front Pembela Islam
(FPI) Mojokerto

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Jurusan Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Sosiologi Agama.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas segera di munaqasahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Oktober 2017

Pembimbing


Dr. Phil. Al Makin MA., Ph D

NIP. 19720912 200112 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.2680/Un.02/D4/PP.05.3/12/2017

Tugas Akhir dengan Judul : Tindakan dan Varian Radikalisme Front Pembela Islam
(FPI Mojokerto)
yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : M. Muji Buddin SM
Nomor Induk Mahasiswa : 13540034
Telah diujikan pada : Jumat, 10 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : B+
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

a.n.

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

NIP. 19720912 200112 1 002

Penguji II

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

NIP. 19711019 199603 2 001

Penguji III

Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag

NIP. 19530611 198603 2 001

Yogyakarta, 10 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Mimi Roswanto, M.Ag

NIP. 19681208 199803 1 002

Motto

Tuhan tidak perlu dibela

(Abdurrahman Wahid)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk almamter saya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi Sosiologi Agama, teman-teman, dan keluarga di Mojokerto.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berusaha untuk menyusun ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kemampuan penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan juga dorongan. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Alim Roswanto, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Dr. Hj. Adib Sofia S.S., M. Hum, selaku ketua Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
4. Dr. Phil. Al Makin, MA., Ph.D sebagai pembimbing yang dengan ikhlas, sabar, dan penuh kebijaksanaan dalam memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Munawar Ahmad, S.S., M. Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dengan sabar dari awal perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sosiologi Agama yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

7. Keluarga di Mojokerto yang telah memberikan dukungan serta kecukupan materil kepada penulis.
8. Teman-teman Sosiologi Agama angkatan 2013 yang telah berbagi ilmu dan pengalaman.
9. Semua narasumber yang telah memberikan waktu dan informasinya dalam penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala yang melimpah dari Allah SWT. walaupun masih jauh dari kesempurnaan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 28 Oktober 2017

Penulis



M. Muji Buddin SM
NIM: 13540034

Abstraksi

Indonesia adalah negara hukum dan berideologikan Pancasila. Para tokoh nasionalis dan agamawan pada saat itu sudah menyepakati ideologi Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara bangsa perlu dijaga dari segala ancaman. Namun ancaman terhadap Pancasila semakin terlihat nyata sebab saat ini banyak ditemukan ormas yang ingin menggantinya dengan syariah Islam, salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

Metode penelitian ini menggunakan studi lapangan. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode Miles dan Haberman. Metode kualitatif deskriptif analisis merupakan model penelitian yang menekankan pada wawancara mendalam, penalaran, dan observasi sebagai data primernya, dan kajian literatur-literatur terkait sebagai data sekudernya. Penelitian ini menggunakan teori radikalisme Islam. Teori ini digunakan untuk melihat bentuk-bentuk aktivitas FPI Mojokerto.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan FPI Mojokerto memperlihatkan penentangannya terhadap hukum negara. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya komunikasi dua arah atau lebih dalam memberantas tempat-tempat yang dianggap oleh FPI maksiat. Oleh karena itu, mereka membuat sebuah peraturan sendiri dengan berdasarkan dalil-dalil agama yang juga mereka tafsirkan sendiri untuk melegitimasi setiap aksi dan tindakannya. Sedangkan dalam hal politik, FPI memiliki tujuan pemberlakuan syariah Islam. Dalam pandangan FPI, syariah Islam bisa dijadikan solusi ketika Indonesia mendapat berbagai masalah. Akan tetapi, hal itu justru bertentangan dengan hukum negara Indonesia, sebab Indonesia sudah memiliki hukum dan ideologi sendiri. Proyeksi seperti itu justru ingin meruntuhkan sistem politik mapan yang sudah dibangun di negara ini.

Keyword: FPI Mojokerto, Radikalisme, Syariah Islam, Politik.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II SEJARAH RADIKALISME INDONESIA	18
A. Sejarah Radikalisme di Indonesia.....	18
B. Faktor-Faktor Pemicu Radikalisme di Indonesia	25
C. Ciri-Ciri Radikalisme Islam.....	26
BAB III SEJARAH TERBENTUKNYA FPI MOJOKERTO DAN PANDANGANNYA TENTANG <i>AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR</i>.....	29

A. Sejarah FPI.....	29
B. Sejarah FPI Mojokerto.....	31
C. Struktur FPI Mojokerto	33
D. <i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i> dalam Pandangan FPI	35
E. Jihad.....	40
F. Tindakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar FPI Mojokerto.....	43
BAB IV Variasi Gerakan Sosial FPI Mojokerto.....	49
A. Variasi Radikalisme FPI Mojokerto	44
B. Radikalisme di Kalangan Pemuda Mojokerto	54
C. Sikap Politik FPI Mojokerto.....	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1: Surat Izin Riset	
Lampiran 2: Pedoman Wawancara	
Lampiran 3: Dokumentasi Foto Riset	
Lampiran 4: <i>Curriculum Vitae</i>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan sosial Islam yang lahir pada penghujung Orde Baru dan awal Reformasi seperti cendawan di musim hujan. Gerakan Islam baru ini di antaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang menjelma menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Front Pembela Islam (FPI), Hizbullah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Komite Persiapan Pembentukan Syariat Islam (KPPSI) Sulawesi Selatan¹.

Munculnya gerakan ini dibarengi dengan adanya cita-cita untuk menggabungkan urusan agama dan negara. Istilah dari munculnya gerakan ini, meminjam istilah dari Nazih Ayubi, disebut muslim politik (*political islamist*) dan muslim kultural (*cultural islamist*).² Dalam bahasa Bachtiar Effendi kecenderungan muslim politik ditandai dengan, *pertama*, Islam harus menjadi dasar negara, syariah harus diterima sebagai konstitusi negara karena kedaulatan politik ada di tangan Tuhan. Menurut kelompok ini gagasan tentang negara bangsa bertentangan dengan konsep ummat yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan, sementara pengakuan prinsip *syura* itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang digunakan dewasa ini. *Kedua*, Islam tidak meletakkan

¹ Zainal Abidin, Wahabisme, “Trannasionalisme, dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam di Indonesia”, dalam *jurnal Tasamuh*, vol. 12, no. 2, Juni 2015, hlm. 134.

² Kunawi Basyir, “Ideologi Politik Islam di Indonesia”, *jurnal At-Tahrir*, vol. 16, no. 2, November 2016, hlm. 341.

teori baku tentang negara, yang harus dijalankan oleh ummat kerana istilah daulah yang memiliki pengertian sistem politik tidak dapat ditemukan dalam Al-qur'an.³

Dalam konteks Indonesia, persinggungan antara hubungan agama dan negara sudah menjadi buah bibir sejak awal kemerdekaan bangsa ini. Dalam buku Negara Paripurna Yudi Latif memaparkan dengan jelas bagaimana persinggungan itu terjadi. Para tokoh-tokoh nasionalis dan agamawan telah menyepakati bersama untuk tidak memasukkan salah satu agama dalam ideologi bangsa. Oleh karena itu, para pendahulu menyepakati ideologi Pancasila sebab bisa merangkul semua golongan tanpa ada tendensi ke salah satu agama.

Negara Indonesia berdasarkan Pancasila bukanlah negara yang terpisahkan dari agama, tetapi juga tidak menyatu dengan agama atau yang disebut Yudi Latif sebagai toleransi kembar. Toleransi kembar ialah situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya untuk kemudian mengembangkan toleransi terhadap fungsinya masing-masing.⁴

Kemunculan ormas-ormas Islam radikal memiliki agenda yang tidak jauh dari urusan agama dan negara. FPI, Laskar Jihad, dan lain-lain sangat kuat mencanangkan pemberlakuan syariah Islam di konstitusi negara, dan bersuara keras terhadap ajaran-ajaran di luar Islam Indonesia seperti Islam Ahmadiyah dan Syiah.⁵ Penegakan syariah ini menurut mereka wajib dilakukan oleh setiap

³ Kunawi Basyir, "Ideologi Politik Islam", hlm. 341.

⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas PANCASILA*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 101

⁵ Al Makin, "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shiah Group in Yogyakarta," *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*, vol. 24, no. 1, 2017, hlm. 8.

muslim, sebab perjuangan ini juga sebagai *jihad fi sabilillah*.⁶ Kesatuan agama dan negara ini adalah prinsip utama, negara bisa Islami ketika syariah mendapat kedudukan tinggi dalam mengatur semua urusan.⁷ Bahkan jika ada yang menolak pemahaman seperti ini darahnya halal dibunuh.⁸

FPI dikenal sebagai ormas Islam yang menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Penegakan ini menginspirasi semua metode dakwahnya baik di jalanan maupun pengajian. Kategori perbuatan *Ma'ruf* dan *Munkar* yang FPI definisikan tidak hanya mencakup masalah agama, melainkan juga mencakup urusan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.⁹

Ada banyak ayat yang dijadikan rujukan normatif FPI, salah satunya ialah Q.S. Ali-Imran ayat 110 yang artinya “kamu adalah sebaik-baik umat yang diturunkan ke muka bumi, menyuruh pada yang *Ma'ruf*, mencegah dari yang *Munkar*, dan beriman kepada Allah”. Ayat lain yang dijadikan rujukan ialah Q.S. Ali-Imran ayat 104, artinya ”dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh pada yang *Ma'ruf*, dan mencegah dari yang *Munkar*”.¹⁰

Dengan dasar itu FPI tidak menginginkan adanya kemaksiatan yang merajalela di masyarakat. Sebab, dengan merajalelanya kemaksiatan menurut

⁶ Syaeful Anwar, “Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012”, *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, vol. 4, no. 1, 2014, hlm. 221.

⁷ Antoni Bubalo, dkk, *PKS dan kembarannya: Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*, terj. Syamsu Rizal, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 63.

⁸ Syukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, civil society, syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Anti Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), hlm. 261.

⁹ Syaeful Anwar, “Pemikiran dan Gerakan”, hlm. 229.

¹⁰ Syaerul Anwar, “Pemikiran dan Gerakan”, hlm. 230-231.

pandangan FPI bencana akan menimpa orang-orang bahkan bisa melukai orang yang tidak melakukan maksiat.¹¹ Sebagai dasar pergerakan FPI, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* menjadi penting untuk dikaji dan ditinjau lebih lanjut akan kontekstualisasi penggunaannya.

Namun dalam kenyataannya ketika FPI ingin memperjuangkan cita-cita mereka banyak yang berakhir dengan konflik¹². Hal ini juga terlihat di FPI cabang Mojokerto. Ketika FPI ini ingin menutup tempat prostitusi di Balong Cangkring berakhir dengan bentrokan. Menurut anggota FPI, bentrokan terjadi dikarenakan ada orang yang menyusup sehingga garis komando untuk tetap melakukan demonstrasi damai tidak bisa dikontrol¹³.

Pada kasus lain FPI Mojokerto juga memperlihatkan aksi kekerasannya di sebuah toko swalayan Indomaret yang menjual miras. Menurut laporan FPI, toko tersebut menjual miras yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Surat peringatan dan himbauan kepada pemilik toko sudah dilakukan namun belum menemukan hasilnya¹⁴. Warga yang melihat ketika ada aksi di toko tersebut, FPI memecah kaca toko dan mengambil secara paksa miras-miras¹⁵.

Tidak hanya itu saja, ketika FPI ingin membantu masyarakat desa Telasih untuk menutup karaoke yang dijadikan tempat prostitusi, FPI terlibat guna menyuarakan aspirasinya dengan mengatasnamakan masyarakat. Salah satunya

¹¹ Syaerul Anwar, "Pemikiran dan Gerakan", hlm. 230.

¹² Haidar Nashir, *Islam Syariat*, (Jakarta: Mizan, 2013), hlm. 422-423.

¹³ Hasil wawancara Unung selaku anggota FPI Mojokerto. Tempat wawancara di basecamp FPI Sooko Mojokerto pada tanggal 27-01-2017.

¹⁴ Hasil wawancara Unung selaku anggota FPI Mojokerto. Tempat wawancara di basecamp FPI Sooko Mojokerto pada tanggal 27-01-2017.

¹⁵ Hasil wawancara Anwar selaku warga lokal yang melihat aksi FPI. Tempat wawancara di rumah Anwar pada tanggal 27-01-2017.

yaitu dengan mengirimkan surat kepada kepala desa, Polres, Polsek, Pemda setempat, namun pihak-pihak tersebut tidak memberikan respon balik.

Dalam uraian di atas terlihat jelas adanya ketidakpatuhan FPI terhadap hukum yang ada. FPI bertindak bukan karena mereka adalah aparat pemerintahan, melainkan atas nama agama yang mereka tafsirkan sendiri. Oleh karena itu, FPI mencoba melegitimasi tindakannya bukan dari hukum yang berlaku di Indonesia melainkan dari hukum agama yang mereka tafsirkan sendiri. Padahal negara ini memiliki aturan dan hukum sendiri, namun seakan-akan aturan tersebut tidak dihiraukan dengan dalih hukum tersebut buatan manusia, dan dalam tafsiran mereka hukum Tuhan yang mereka jalankan bersifat mutlak tanpa ada kekurangan sedikitpun.

Upaya tersebut juga bisa dikatakan sebagai gerakan melumpuhkan legitimasi negara. Sebab, dalam pandangan FPI negara sudah gagal karena membiarkan maraknya kemaksiatan di masyarakat. Akan tetapi cara yang ditempuh oleh FPI justru bertentangan dengan hukum negara. FPI seakan-akan meletakkan hukum negara jauh dari konteks kehidupannya. Oleh karenanya, tidak jarang FPI bertindak sesuka hatinya dengan mengatasnamakan agama yang mereka tafsirkan sendiri untuk memberantas tempat yang dinggap maksiat.

Dari sini sudah terlihat jelas adanya jarak yang menjadi problem antar hukum negara atau politik di Indonesia dengan tindakan FPI. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dirumuskan dua masalah. *Pertama*, pemahaman *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* FPI Mojokerto dan penerapannya dalam aksi mereka. *Kedua*, bentuk variasi gerakan sosial aksi FPI.

Dipilihnya FPI Mojokerto dikarenakan; *Pertama*, melihat letak geografis Mojokerto, kota ini dekat dengan Jombang yang memiliki *image* kota santri dan menjadi basisnya Nahdlatul Ulama (NU) yang dikenal sebagai ormas moderat. *Kedua*, letak Mojokerto yang dekat dengan Surabaya. Ini memungkinkan adanya perubahan masyarakat yang cukup signifikan. Sebab, Surabaya adalah kota besar yang memiliki permasalahan yang kompleks. Sehingga, karena letaknya dekat, Mojokerto mau tidak mau ikut dalam arus yang ada di Surabaya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat ialah:

1. Bagaimana pemahaman *Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar* FPI Mojokerto dan penerapannya dalam aksi mereka?
2. Bagaimana bentuk variasi gerakan sosial FPI Mojokerto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian di sini ialah;

1. Untuk menjelaskan bagaimana pemahaman konsep *Amar Ma'ruf Dan Nahi Munkar* FPI Mojokerto dan penerapannya dalam aksi.
2. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk variasi gerakan sosial FPI Mojokerto.

Selanjutnya penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik secara praktis maupun teoretis.

1. Secara teoretis-akademis, kegunaan penelitian ini untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan objek FPI, khususnya FPI Mojokerto.

Dipilihnya teori radikalisme karena cocok untuk melihat fenomena kekerasan yang dilakukan oleh FPI Mojokerto.

2. Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat tentang aktivis FPI Mojokerto. Sehingga dari situ masyarakat akan lebih mengetahui dan memahami radikalisme yang ada dalam FPI Mojokerto.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu dengan objek FPI di antaranya:

Pertama, Al Makin, “Identitas Keacehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat, dan Hegemoni” dalam *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 11, no. 1, September 2016. Jurnal ini menjelaskan bagaimana isu-isu syariatisasi, kristenisasi, hegemoni Barat, dan aliran sesat di kehidupan warga Aceh pasca Tsunami 2004. Dalam penjelasannya misi-misi kristenisasi, hegemoni Barat, dan aliran sesat menunjukkan indikasi bahwa proses syariatisasi di Aceh berujung pada sikap konservatisme. Hal ini bisa dilihat dari identitas yang ada di Aceh yang memiliki otonomi khusus sejak era Gus Dur. Identitas syariah yang kental juga memberikan penguatan agar Aceh juga tidak lepas dari NKRI, sebagaimana yang terjadi di Timor Timur.

Kedua, M. Suryadinata, “Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur’an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim”, dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 2, No. 3, 2015. Jurnal ini menganalisis penafsiran FPI mengenai kepemimpinan non-muslim dalam masyarakat Islam. Dalil-dalil al-Qur’an digunakan sebagai landasan FPI untuk tidak menerima pemimpin non-

muslim. Penafsiran FPI terhadap ayat-ayat larangan pemimpin non-muslim cenderung tekstualis dan terkesan memaksa. Padahal status agama seseorang tidak menjadi faktor penentu totalitas kerja seorang pemimpin.

Ketiga, Ahmad Mutaqin, “Kekerasan Atas Nama Agama (Reinterpretasi dan Kontekstualisasi Jihad dan *Amar Ma’ruf Nahi Munkar*)”, dalam *jurnal Al-Adyan*, Vol. VII, No. 2, 2012. Melihat dari fenomena kekerasan yang terjadi di Indonesia, baik isu-isu terorisme maupun kekerasan yang dilakukan oleh ormas-ormas radikal, maka doktrin jihad dan *Amar Ma’ruf Nahi Munkar* merupakan doktrin fundamental yang menjadi landasan tindakan terorisme dan kekerasan yang mereka lakukan. Jika dalam al-Qur’an sesungguhnya bersifat difa’i (tindakan defensif) bukan ofensif-represif sedangkan *al-amru bi al-ma’ruf wa nahi an munkar* lebih mengarah pada sikap moral kaum muslim dalam kehidupan sosial. Ma’ruf menunjukkan kebajikan yang telah disepakati bersama, yang di dalamnya tentu mengandung kemaslahatan, yang legitimasinya adalah tertuang dalam bentuk hukum-hukum tertulis atau undang-undang yang disepakati. Maka dalam hal ini tentunya dikeluarkan oleh negara yang berstatus demokratis, yang dalam hal ini publik mesti mentaatinya demikian juga sebaliknya munkar. Dengan demikian tidak ada ruang bagi publik atau kelompok tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan kekerasan atau main hakim sendiri dalam pelaksanaannya, melainkan dilakukan oleh negara ataupun aparat atau lembaga yang ditunjuk oleh negara.

Keempat, Yanwar Pribadi. “Budaya Lokal Versus Islam: Perseteruan antara Bupati Purwakarta dan FPI dalam Kerangka Demokratisasi dan Desentralisasi”,

Jurnal Multikultural dan Multireligius, vol. 5, no. 3, 2016. Jurnal ini mengeksplorasi hubungan antara Islam dan budaya lokal di Indonesia dalam kerangka demokratisasi dan desentralisasi. Fokus spesifiknya adalah perseteruan antara pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq dan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi bersama-sama dengan Angkatan Muda Siliwangi (AMS). Jurnal ini menunjukkan bahwa pemimpin lokal di Indonesia pada masa demokratisasi dan desentralisasi telah terlibat dalam arena politik yang bergejolak dan proses tersebut telah membentuk watak situasi politik Indonesia. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa proses demokratisasi dan desentralisasi yang terus berjalan telah memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin lokal yang sepintas terlihat otonom, seperti Dedi Mulyadi dan Habib Rizieq. Jurnal ini berpendapat bahwa kemunculan ekspresi-ekspresi kesalehan Islam dan ketahanan budaya yang lebih terbuka telah membentuk dan memberikan karakter pada pemimpin massa tertentu yang berpengaruh.

E. Kerangka Teori

1. Radikalisme dan Otoritas Politik

Untuk menjelaskan fenomena FPI Mojokerto, di sini akan menggunakan teori radikalisme. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2015) radikalisme ialah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.

Radikalisme berasal dari kata *radical* yang artinya akar atau dasar. Sebagai kata benda, radikal berarti seseorang yang berpandangan radikal baik dalam

kontek politik dan agama.¹⁶ Radikalisme sebagai aliran atau paham muncul melalui proses pengenalan, penanaman, dan penghayatan. Proses inilah yang disebut radikalisasi. Jika radikalisasi berjalan dengan baik, maka radikal menjadi isme atau paham sehingga menjadi radikalisme.¹⁷ Dalam kajian ilmu sosial politik mutakhir, analisis wacana dan kritik ideologi, radikalisme dipahami sebagai gejala sosial dan politik yang lahir dalam kondisi dislokasi atau krisis yang bersifat permanen dalam masyarakat.¹⁸

Adapun menurut Azyumardi Azra, Radikalisme mengacu pada gagasan dan tindakan kelompok yang bergerak untuk menumbangkan tatanan politik mapan, negara-negara atau rezim-rezim lain, yang bertujuan untuk melemahkan otoritas politik dan legitimasi negara-negara atau rezim-rezim lain dan negara-negara yang berusaha menyesuaikan atau mengubah hubungan-hubungan kekuasaan yang ada dalam sistem internasional. Istilah radikalisme karenanya secara intrinsik berkaitan dengan konsep tentang perubahan politik dan sosial pada berbagai tingkatan.¹⁹ Di samping istilah radikalisme Islam, terdapat istilah fundamentalisme, Islamisme, revivalisme, neo-fundamentalisme, post-

¹⁶ Sefriyono & Mukhibat, "Radikalisme Islam: Pergulatan Ideologi ke Aksi", jurnal *Al-Tahrir*, vol. 17, no. 1, Mei 2017, hlm. 211.

¹⁷ Karwadi, "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam", *Al-Tahrir: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, vol. 14, no. 1, 2014, hlm. 142.

¹⁸ Muhammad Najib Azca, "Yang Muda, Yang Radikal: Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia", jurnal *Maarif Insitute*, vol. 8, no. 1, 2013, hlm. 25.

¹⁹ Marhaeni Saleh, *Tinjauan Kritis Terhadap Fundamentalisme dan Radikalisme Islam*, jurnal *Politik Profetik*, vol. 1, no. 1, 2013.

Islamisme,²⁰ yang kesemuanya memiliki tafsiran berbeda-beda tetapi merujuk pada satu fenomena kebangkitan Islam.²¹

Oleh karena itu, fenomena kebangkitan Islam ini memiliki keinginan untuk menerapkan sistem syariatisasi dalam Perda maupun ruang publik dan menunjukkan adanya penyeragaman identitas baru, atau dalam istilah yang digunakan oleh Al Makin *homogenizing*.²² Penyeragaman ini juga digunakan oleh ormas radikal untuk menyatukan paham keagamaan sunni Indonesia. Oleh karena itu, paham-paham seperti Ahmadiyah dan Syiah ingin ditolak oleh ormas radikal.

Muhammad Najib Azca dalam analisisnya menjelaskan bagaimana radikalisme bisa terjadi. Menurut Azca setidaknya ada dua faktor penting yang bisa digunakan untuk melihat fenomena radikalisme tersebut. *Pertama*, dinamika sosial politik di fase awal transisi menuju demokrasi yang galib ditandai dengan tingginya gejolak derajat dan ketidakpastian. Pada fase ini terjadilah pembukaan struktur kesempatan politik yang relatif sempit di bawah rezim otoriter, sehingga ketersediaan struktur kesempatan politik menjadi variabel penting mobilisasi gerakan sosial, salah satunya berwujud gerakan Islam. *Kedua*, transformasi gerakan Islam yang sebagian memiliki geneologi pada awal kemerdekaan.²³

²⁰ Asef Bayat, *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*, (Oxford University Press, 2013), dalam Ali Asghar, "Islam Politik dan Radikalisme: Tafsir Baru kekerasan Aktivisme Islam Indonesia", jurnal *keamanan nasional*, vol. 1, no. 2, 2015, hlm. 198.

²¹ Ali Asghar, "Islam Politik dan Radikalisme: Tafsir Baru kekerasan Aktivisme Islam Indonesia", jurnal *keamanan nasional*, vol. 1, no. 2, 2015, hlm. 198.

²² Al Makin, "Identitas Keacehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat, dan Hegemoni Barat," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 11, no. 1, September 2016, hlm. 13-15.

²³ Muhammad Najib Azca, "Yang Muda, Yang Radikal", hlm. 17.

2. Varian Radikalisme

Ditinjau dari pengertian radikalisme sosial politik di atas, Azca lebih lanjut menjelaskan bahwa radikalisme pada gilirannya bisa terwujud dalam dua varian. *Pertama*, radikalisme demokratis-inklusif, dan kedua radikalisme intoleran-eksklusif. Radikalisme demokratis-inklusif menggunakan logika inklusif dan partisipatori melalui aksi kolektif untuk membuat perubahan dan bernegosiasi secara politik dengan kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat dan negara. Sedangkan radikalisme intoleran-esklusif menggunakan logika penarikan diri dari ko-eksistensi pada saat menghadapi dislokasi atau krisis.²⁴

Sedangkan menurut Greg Fealy, Islamisme dikatakan sebagai gerakan yang bercirikan: *Pertama*, gerakan kebangkitan Islam dari keterpurukan abad ke-20. *Kedua*, sebagai perjalanan dari kafilah (transmisi) Islam internasional yang berideologi fundamentalis global.²⁵ Fenomena Islam radikal mengacu pada gerakan-gerakan Islam yang mencari perubahan secara dramatis dalam masyarakat dan negara. Mengimplementasikan hukum dan syariah Islam secara menyeluruh pada sendi-sendi kehidupan. Kelompok Islam radikal cenderung memiliki interpretasi al-Qur'an secara literal, terutama bagian-bagian yang berkaitan dengan hubungan sosial, perilaku keagamaan, dan hukuman kejahatan, dan mereka juga berusaha untuk mematuhi aturan normatif yang sudah diajarkan oleh nabi Muhammad.²⁶

²⁴ Muhammad Najib Azca, "Yang Muda, Yang Radikal", hlm. 26.

²⁵ Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah*, (Jakarta: Mizan, 2007), hlm. 23.

²⁶ Greg Fealy and Virginia Hooker (eds.), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*, (Singapore: ISEAS, 2006), hlm. 4.

Fealy juga menambahkan bahwa bentuk dan ekspresi kegiatan Islam radikal bervariasi mulai dari proyek-proyek intelektual, dakwah dan politik hingga penggunaan tindak kekerasan.²⁷ Secara tentatif Fealy membagi gerakan non-mainstream menjadi dua: *Pertama*, gerakan non-salafi yang mengikatkan diri dengan semangat mewujudkan doktrin secara kaffah dalam arti literal. *Kedua*, gerakan salafi yang berusaha mewujudkan cita-cita sosial politik Islam yang berbeda dengan formulasi gerakan Islam mainstream. Dua gerakan ini tumbuh secara bersama dan saling bersinggungan.²⁸

Dalam pandangan Noorhaidi Hassan, radikalisme Islam merupakan varian dalam Islam politik yang menginginkan perubahan radikal dalam sistem politik atau masyarakat, bahkan jika perlu dengan jalan kekerasan. Radikalisme Islam memiliki dua ciri; *Pertama*, visi tentang tatanan politik Islam yang menolak legitimasi negara bangsa modern dan berupaya mendirikan pemerintahan pan-Islam ataupun merevitalisasi sistem kekhilafahan. *Kedua*, penekanan terhadap perjuangan kekerasan (jihad) sebagai metode utama dan bahkan satu-satunya yang dianggap sah untuk mewujudkan perubahan politik.²⁹

Di dalam radikalisme Islam tersimpan semangat otoritarianisme yang menghendaki terwujudnya perubahan sistem secara menyeluruh. Radikalisme yang dikemas dengan semangat dan doktrin jihad melahirkan jihadisme. Seorang jihadis memiliki keyakinan bahwa keadaan sekarang yang diliputi pengingkaran

²⁷ Greg Fealy, "Radical Islam in Indonesia: History, Ideology, and Prospect" in Greg Fealy and Aldo Borgu, *Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia* (Australian Strategy Policy Institute, 2005), hlm. 12.

²⁸ Greg Fealy dan Anthony Bubalo, *Jejak Kafilah*, hlm. 33.

²⁹ Noorhaidi Hassan, *Islam Politik di Dunia Kontemporer*, (Yogyakarta: SUKA PRESS UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 23.

terhadap hukum-hukum ilahi membuat perjuangan dengan jalan kekerasan bukan saja sah tetapi bahkan wajib dilakukan oleh setiap individu muslim.³⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data dalam judul penelitian Tindakan dan Varian Radikalisme Front Pembela Islam (FPI) Mojokerto digunakan metode penelitian kualitatif. Digunakannya kualitatif sebab akan menghasilkan data yang deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dan bersifat interpretatif.³¹

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian menurut Sugiyono terdiri dari:³²

- a. Data Primer, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul.
- b. Data sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, seperti melalui dokumen atau lewat orang lain.

3. Instrumen Pengambilan Data

Untuk pengambilan data dari sumber data primer, dibutuhkan teknik pengambilan data. Adapun teknik tersebut ialah:

- a. Wawancara, panduan wawancara yang sudah disusun secara tertulis sesuai dengan masalah, kemudian digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan

³⁰ Noorhaidi Hassan, *Islam Politik di Dunia Konetemporer*, hlm. 24-25.

³¹ Bagong Suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana. 2011), hlm. 166.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 220.

informasi. Pemilihan orang yang akan diwawancarai dari FPI Mojokerto akan peneliti pilih sesuai permasalahan di atas. Hasilnya, peneliti berhasil mewawancarai ketua FPI Mojokerto Yus Aliansyah (38), dan dua anggota Unung (29) dan Rofiq (28), dan satu warga setempat Anwar (19).

- b. Observasi atau pengamatan, pengamatan ini akan dilakukan pada FPI Mojokerto dalam aktivitas kesehariannya, sehingga dari situ akan dicatat secara sistematis apa saja unsur-unsur yang nampak. Melalui pengamatan ini peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.³³
- c. Dokumenter, menurut Sugiyono, dokumentasi akan mendukung hasil dari observasi dan wawancara agar lebih kredibel.³⁴

4. Teknik Analisis Data.

Adapun untuk teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah model Miles dan Huberman. Terdapat tiga tahapan dalam analisis Miles dan Huberman;

- a. Tahap reduksi data, proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.³⁵

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 229.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 240.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 92.

- b. Penyajian data, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³⁶
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas lagi pembahasan yang akan diangkat diperlukan suatu sistematika pembahasan. Sistematika ini terdiri dari awal bab hingga akhir bab

Bab pertama menjelaskan secara detail problem akademik yang diangkat dalam penelitian ini. Dari situ dirumuskan dua permasalahan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya, dan juga menjelaskan teori radikalisme yang dipakai dalam menganalisis fenomena radikalisme FPI Mojoketo.

Bab kedua menjelaskan sejarah singkat radikalisme Islam di Indonesia. Runtutannya dimulai dari era Orde Lama hingga pasca reformasi yang ditandai begitu banyak gerakan atau ormas yang muncul. Dalam bab ini juga dijelaskan faktor-faktor internal maupun eksternal lahirnya gerakan radikalisme di Indonesia.

Bab ketiga merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama, yaitu menjelaskan konsep *Amar Ma'ruf Nahi Nahi Munkar* dalam pandangan FPI. Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana penerapan dari *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dalam tindakan FPI.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 95.

Bab keempat merupakan pembahasan atas rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana varian radikalisme Islam yang ada dalam FPI Mojokerto. Mulai dari konsep gerakan keagamaan maupun gerakan politik yang dilakukan di Mojokerto.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dalam catatan Greg Barton radikalisme tumbuh lagi di Indonesia pada tahun 1950-an. Kemunculan ini ditandai dengan berkembangnya organisasi Darul Islam yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Kemunculan ini berdasarkan semangat juang dari dalam masyarakat Indonesia. Kedua, adanya infiltrasi dari Timur Tengah dengan menjalin kerjasama antara Muhammad Natsir dan Universitas Ibn Saud, yang notabennya berpaham wahabi. Gerakan infiltrasi ini mulai masif bermunculan pada tahun 1990-an dan menjadi gerakan yang nyata sejak zaman reformasi.

Kemunculan radikalisme di Indonesia dalam pandangan Najib Azca ada dua bentuk. *Pertama*, dinamika sosial politik di fase awal transisi menuju demokrasi yang galib ditandai dengan tingginya gejolak derajat dan ketidakpastian. Pada fase ini terjadilah pembukaan struktur kesempatan politik yang relatif sempit di bawah rezim otoriter, sehingga ketersediaan struktur kesempatan politik menjadi variabel penting mobilisasi gerakan sosial, salah satunya berwujud gerakan Islam. *Kedua*, transformasi gerakan Islam yang sebagian memiliki geneologi pada awal kemerdekaan.

Adapun mengenai agenda politik yang dibangun oleh gerakan Islam radikal di antaranya: *Pertama*, visi tentang tatanan politik Islam yang menolak legitimasi negara bangsa modern dan berupaya mendirikan pemerintahan pan-Islam ataupun merevitalisasi sistem kekhalifahan. *Kedua*, penekanan terhadap

perjuangan kekerasan (jihad) sebagai metode utama dan bahkan satu-satunya yang dianggap sah untuk mewujudkan perubahan politik

FPI sebagai salah satu ormas radikal di Indonesia muncul pada tahun 1998. Mulai saat itu FPI secara massif menyebarkan ide dan gagasannya di berbagai daerah, salah satunya di Mojokerto. FPI Mojokerto lahir dari lingkaran pengajian Tajul Muslimin di rumah Abah Fanani, pemilik percetakan Fajar. Pengajian ini rutin mengundang beberapa Habib untuk mengisi ceramah agama. Oleh karenanya dalam kesempatan itu mereka mengundang Habib Rizieq untuk mengisi ceramah agama. Pada tahun 2000, ketika itu FPI sudah terbentuk, Habib Rizieq diundang lagi untuk mengisi ceramah agama, pada saat itu juga Habib Rizieq menyarankan untuk membentuk sebuah kepengurusan FPI di daerah Mojokerto.

Namun dari awal pembentukan FPI Mojokerto hingga saat ini belum ada kepengurusan yang tetap. Jumlah anggota yang aktif di FPI Mojokerto belum didata secara sistematis dan terstruktur. Bahkan jabatan ketua sementara saat ini dipegang oleh Yus Aliansyah yang menggantikan ketua sebelumnya karena meninggal. Oleh karena itu FPI Mojokerto dalam waktu dekat-dekat ini akan mengadakan rapat untuk memilih ketua selanjutnya dan mencatat seluruh anggota yang aktif diberbagai kecamatan.

Dalam hal paham keagamaan yang dianut oleh FPI mengikuti Ja'far Umar Thalib, pendiri Forum Komunikasi Ahlu Sunnah Wal-Jamaah (FKAWJ). Namun terdapat perbedaan antara FPI dan FKAWJ. Perbedaan itu terlihat dari ritual keagamaan FKAWJ yang terlihat kaku, kurang toleran terhadap perbedaan,

sedangkan FPI lebih lentur dalam mempraktekkan paham aswaja mereka. Oleh karenanya, di FPI Mojokerto para anggotanya masih banyak yang ikut dalam tradisi Nahdlotul Ulama (NU) seperti tahlilan, barjanji, sholawatan, dan lain-lain.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar hukumnya fardu kifayah. Artinya jika ada seseorang yang sudah melakukan hal tersebut maka kewajiban orang lain akan gugur. Oleh karena itu FPI mengambil tindakan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* secara kolektif untuk menggugurkan kewajiban orang lain. Perjuangan ini dilandasi hadits Nabi untuk menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dengan tangan, lisan, dan hati. Dalam pandangan Habib Rizieq dakwah dengan tangan ini berupa kekuasaan atau kekerasan. Habib Rizieq membolehkan berdakwah dengan kekerasan sebab itu adalah jalan supaya *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* tercapai.

Berdakwah dengan kekerasan atau kekuasaan menandakan bahwa di dalamnya terdapat semangat Jihad. Seorang jihadis akan melakukan berbagai aksinya untuk mewujudkan cita-citanya, atau lebih dikenal dengan semangat otoritarianisme. Sebagaimana yang terlihat dalam aksi FPI Mojokerto. kekerasan yang dilakukan bagi mereka adalah jalan terakhir untuk mewujudkan cita-citanya. Hal ini terlihat ketika menutup tempat-tempat maksiat di Balong Cangkring, karaoke di Telasih, dan warung di Gondang.

Model kekerasan yang dilakukan oleh FPI Mojokerto menjadi bukti bahwa gerakan keagamaan ini masuk dalam kajian radikalisme agama. Sebab FPI Mojokerto ingin merubah masyarakat Mojokerto bersih dari berbagai kemaksiatan. Oleh karenanya berbagai model akan dilakukan, dan kekerasan bisa menjadi model yang paling utama dalam berdakwah. Dalam pandangan Noorhaidi

Hassan, semangat jihadis dengan melakukan kekerasan seperti ini menjadi salah satu bentuk dari radikalisme agama.

Tindakan kekerasan di sisi lain juga memperlihatkan bahwa hukum di Indonesia tidak dihiraukan lagi. Menurut FPI hukum Indonesia tidaklah mutlak seperti hukumnya Tuhan, dan tindakan tersebut mendapat legitimasi dari agama yang mereka tafsirkan sendiri. Oleh karena itu, tindakan-tindakan FPI banyak di antaranya yang bertentangan dengan hukum negara. Tindakan seperti ini menurut Azyumardi Azra sebagai proses pelemahan otoritas politik yang ada di Indonesia.

FPI Mojokerto bisa dikatakan sebagai radikalisme intoleran eksklusif. Hal ini dikarenakan FPI Mojokerto tidak menaati peraturan yang berlaku. Meskipun FPI bekerja sama dengan warga dan aparat setempat, akan tetapi cara kekerasan yang mereka lakukan bertentangan dengan peraturan yang ada. Tindakan yang mereka lakukan bisa dikatakan main hakim sendiri tanpa memberikan hak penuh kepada pihak yang berwajib. Bagi mereka, pemerintah sudah gagal dalam menumpas kemaksiatan yang ada di Mojokerto. Oleh karena itu mereka mengambil inisiatif untuk memberantas kemaksiatan sendiri dengan dalih menegakkan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*.

Oleh karena itu, jalan yang ditempuh oleh FPI dengan cara menarik diri dari kultur dan peraturan yang ada di Mojokerto. Dengan cara seperti itu FPI Mojokerto bergerak dengan sendirinya, tanpa terikat dalam aturan yang baku. Aturan-aturan yang dibuat untuk melindungi segenap masyarakat Mojokerto justru tidak dihiraukan dengan membuat gerakan yang bersifat keras, yang notabeneanya membuat masyarakat risau. Alih-alih ingin memberantas tempat

maksiat namun kekerasan yang dilakukan justru menjadi masalah yang lebih besar.

Dalam masalah politik di Mojokerto, FPI Mojokerto belum memiliki agenda yang besar. Namun hanya bersuara untuk menghilangkan atau mencabut undang-undang tentang pendirian tempat yang dianggap maksiat. Mengingat tujuan FPI Mojokerto ingin membersihkan Mojokerto dari berbagai maksiat, oleh karenanya melalui jalur pemerintah setidaknya tujuan tersebut bisa terealisasikan. Proyek ini bisa dikatakan sebagai upaya untuk menyeragamkan sebuah tatanan masyarakat dari hal-hal bersifat menyimpang dari Islam. Dengan kata lain di sini ada proses homogenisasi ke arah masyarakat Islamis.

Di samping itu juga, agenda politik FPI Mojokerto masih berputar pada masalah kepemimpinan. Bagi mereka, memilih pemimpin harus yang memiliki pemahaman agama Islam kuat, supaya ke depannya adanya sinergi antara pemimpin Mojokerto dengan agenda-agenda 'Islamisme' di Mojokerto. Hal ini justru memperkuat bahwa, di samping semangat otoritarianisme, gerakan radikalisme FPI Mojokerto juga dilalui dengan cara reformis. Sebuah cara untuk mewujudkan cita-citanya melalui jalur politik. Dengan kata lain, proses syariatisasi melalui pemilihan pemimpin Islam sebuah identitas religius dari FPI. Sebab dimanapun FPI berada, identitas FPI untuk memperjuangkan syariat Islam sudah menjadi pedoman hidup yang harus ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari.

Semangat jihadis dan reformis yang diperlihatkan oleh FPI Mojokerto menjadi sinyal kuat bahwa gerakan ini memang layak disebut radikal. Apalagi

mereka akan membuat struktur rapi yang di dalamnya terdapat Laskar Pembela Islam, sebuah laskar militer yang ada dalam FPI, membuat mereka akan bergerak secara lebih massif dalam menumpas berbagai tempat yang dianggap maksiat oleh FPI ada di Mojokerto.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis akan memberikan saran sebagai acuan baik bagi masyarakat umumnya dan peneliti selanjutnya dalam menanggapi permasalahan terkait perkembangan radikalisme agama di Indonesia. Beberapa saran yang perlu diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) dengan terselesaikannya penelitian tentang aktivitas radikal Front Pembela Islam (FPI) Mojokerto bukan berarti bahwa pembahasan terkait gerakan-gerakan radikal berakhir sampai disini. Perlu adanya pengembangan penelitian lebih lanjut terkait radikalisme agama yang terjadi di Indonesia dengan kebaruan perspektif maupun ditinjau dari berbagai sudut pandang. Permasalahan terkait radikalisme agama terutama aktivitas yang dilakukan oleh Front Pembela Islam merupakan gerakan yang sangat besar dan sering mendapatkan perhatian publik, karena pada akhirnya permasalahan ini juga dilatarbelakangi oleh berbagai konteks baik dari segi kultural maupun politik;
- 2) dalam memberikan informasi, sebaiknya para anggota FPI Mojokerto lebih terbuka untuk memberikan penjelasan sehingga peneliti akan lebih mudah

dalam menganalisis dan hasil penelitian lebih mendalam untuk memenuhi kebutuhan intelektual terkait radikalisme agama yang lebih mutakhir;

- 3) bagi peneliti selanjutnya, perlu adanya pengembangan penelitian terkait massa gerakan radikal Front Pembela Islam (FPI) secara umum banyak berasal dari masyarakat NU yang pada dasarnya mengusung konsep Islam ramah dan toleran, maka hal ini perlu digali kembali untuk melengkapi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal. "Wahabisme, Transnasionalisme, dan Gerakan-Gerakan Radikal Islam di Indonesia". Dalam *jurnal Tasamuh*. Vol. 12. No. 2. Juni 2015.
- Adiwilaga, Rendy. "Gerakan Islam Politik dan Proyek Historis Penegakan Islamisme di Indonesia". *Wacana Politik*. Vol. II, No. I, Maret 2017.
- Ahnaf, Mohammad Iqbal. "Tiga Jalan Islam Politik di Indonesia: Reformasi, Refolusi, Revolusi". *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*. Vol. 1. No. 2. Juli 2016.
- _____, "Aksi Bela Islam: Akankah Mengubah Lanskap Muslim Indonesia?". *Maarif Institute*. Vol. 11. No. 2. 2016.
- Aliansyah Yus. Selaku ketua dan Korlap FPI Mojokerto. Tempat wawancara di kediaman Yus Aliansya. Pada tanggal 18-05-2017 dan 25-07-2017.
- Anwar, Saeful. "Pemikiran dan Gerakan Amr Ma'ruf Nahi Munkar Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia 1989-2012". *Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. IV, No. I, Juni 2014.
- Anwar. Selaku warga yang melihat aksi sweeping FPI Mojokerto di salah satu toko swalayan. 29-01-2017.
- Asghar, Ali. "Islam Politik dan Radikalisme: Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam Indonesia." *Keamanan nasional*. Vol. 1. No. 2. 2015.
- Asmani, Jamal Ma'mur. "Rekonstruksi Teologi Radikalisme di Indonesia, Menuju Islam Rahmatan lil Alamin". *Wahana Akademika*. Vol. 4. No. 1. April 2014.
- Azra, Azyumardi. "Revitalisasi Islam Politik dan Islam Kultural di Indonesia". *Jurnal Indo-Islamika*. Vol. 1. No. 2. 2012.
- Azca, Muhammad Najib. "Yang Muda, Yang Radikal" Refleksi Sosiologis Terhadap Fenomena Radikalisme Kaum Muda Muslim di Indonesia". *Maarif Institute*. Vol. 8. No. 1. 2013.
- Baidhawiy, Zakiyuddin. *Konsep Jihad dan Mujahid Damai*. Jakarta: Kementerian Agama Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Islam. 2012.
- Bayat, Asef. *Post-Islamism: The Changing Faces of Political Islam*. Oxford University Press. 2013.
- Basyir, Kunawi. "Menimbang Kembali Konsep dan Gerakan Fundamentalisme Islam di Indonesia". *Al-Tahrir*. Vol. 14, No. 1, Mei 2014.

- Burhani, Ahmad Najib. "Aksi Bela Islam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan". *Maarif Institute*. Vol. 11. no. 2. 2016.
- Bubalo, Anthony, dkk. *PKS dan Kembarannya: Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. Terj. Syamsu Rizal. Jakarta: Komunitas Bambu. 2012.
- Bonar Tigor Naipospos, Ismail Basani (ed). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. 2012.
- Faiz, Fahrudin. "Front Pembela Islam: Antara Kekerasan dan Kematangan Beragama". *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. Vol. 8.No. 2. Desember 2014.
- Greg Fealy, Aldo Borgu. *Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia*. Australian Strategy Policy Institute. 2005.
- Greg Fealy, Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah*. Jakarta: Mizan. 2007.
- Helfstein, Scott (ed). *The Combating Terrorism at West Point Radical Islamic Ideology in Southeast Asia*. Southeast Asia Project. 2009.
- Kamil, Syukron. *Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Anti Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2013.
- Karwadi. "Deradikalisasi Pemahaman Ajaran Islam". *Al-Tahrir: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*. Vol. 14. No. 1. 2014.
- Khelmi K. Pribadi & Wahyudi Akmaliah Muhammad, "Anak Muda, Radikalisme, dan Budaya Populer", *Jurnal Maarif Institute*. Vol. 8, No. 1. Juli 2013.
- Laisa, Emna. "Islam dan Radikalisme". *Jurnal Islamuna*. Vol. 1. No. 1. 2014.
- Latif Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas PANCASILA*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2015
- Haidar Nashir. *Islam Syariat*. Jakarta: Mizan. 2013.
- Hassan, Noorhaidi. *Islam Politik di Dunia Kontemporer*. Yogyakarta: SUKA Press. 2012.
- Makin Al. "Homogenizing Indonesian Islam: Persecution of the Shiah Group in Yogyakarta." *Studia Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies*. Vol. 24. No. 1. 2017.

- Makin Al. "Identitas Keacehan dalam Isu-Isu Syariatisasi, Kristenisasi, Aliran Sesat, dan Hegemoni Barat." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 11. No. 1. September 2016.
- Mubarok, Zaki. "Dari NII ke ISIS: Transformasi Ideologi dan Gerakan dalam Islam Radikal di Indonesia Kontemporer". *Jurnal Episteme*. Vol. 10. No. 1. 2015.
- Mutaqin, Ahmad. "Kekerasan Atas Nama Agama (Reinterpretasi dan Konoteksualisasi Jihad dan Amar Ma'ruf Nahi Munkar)". *Jurnal Al-Adyan*. Vol. 7. No. 2. 2012.
- Mukhibat, Sefriyono. "Radikalisme Islam: Pergulatan Ideologi ke Aksi". *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 17. No. 1. Mei 2017.
- Newby, Brian. *Watchful Guardian or Dark Knight? The Vigilante as a Social Actor*. Delaware: International Foundation for Protection Officers. 2012.
- Pribadi, Yanwar. "Budaya Lokal Versus Islam: Perseteruan antara Bupati Purwakarta dan FPI dalam Kerangka Demokratisasi dan Desentralisasi". *Jurnal Multikultural dan Multireligius*. Vol. 5. No. 3. 2016.
- Rofiq, Ahmad Choirul. "Awal Radikalisme Islam: Penyebab Kemunculan Khawarij". *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 14. No. 1. Mei 2014.
- Sahri. "Radikalisme Islam di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam". *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 6. No. 1. 2016.
- Saleh, Marhaeni. "Tinjauan Kritis Terhadap Fundamentalisme dan Radikalisme Islam". *Jurnal Politik Profetik*. Vol. I, No. I. 2013.
- Situmorang, Abdul Wahib. *Gerakan Sosial: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Suryadinata, M. "Kepemimpinan Non-Muslim dalam al-Qur'an: Analisis terhadap Penafsiran FPI Mengenai Ayat Pemimpin Non-Muslim". Dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*. Vol. II, No. III, Januari-Juni 2015.
- Sukabdi, Zora A. "Kaum Muda dan Radikalisme". *Jurnal Maarif Institute*. Vol. 8, No. 1. 2013.
- Syaefudin, Machfud. "Reinterpretasi Gerakan Dakwah Front Pembela Islam (FPI)". Dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. XXXV, No. II, Juli-Desember 2014.
- Sutinah, Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana. 2011.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Syihab, Rizieq. *Dialog FPI: Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Jakarta: Pustaka Ibnu Saidah. 2008.
- Thobib Al-Asyhar, Jajar Zarkasy. *Radikalisme Agama dan Tantangan Kebangsaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bima Islam Kemenag RI. 2014.
- Ummah, Sun Choirul. "Akar Radikalisme Islam di Indonesia". Jurnal *Humanika*. No. 12. September 2012.
- Unung, Rofiq, dkk. Selaku anggota FPI Mojokerto. Tempat wawancara di basecamp FPI Sooko Mojokerto. 27-01-2017.
- Virginia Hooker, Greg Fealy (eds). *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*. Singapore: ISEAS. 2006.
- Zuly Qodir, Bilveer Singh. *Gerakan Islam Non-Mainstream dan Kebangkitan Islam Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Zuly Qodir. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.





BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR

Penyelenggaraan Ujian Tugas Akhir Mahasiswa

A. Waktu, Tempat dan Status Ujian Tugas Akhir:

1. Hari dan Tanggal : Jumat, 10 November 2017
2. Pukul : 10:30 s/d 11:30 WIB
3. Tempat : FUSAP-1-1K2
4. Status : Utama/Penundaan/Susunan/Mengulang

B. Susunan Tim Ujian Tugas Akhir:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Sidang	Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.	1.
2.	Penguji I	Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.	2.
3.	Penguji II	Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.	3.
4.	Penguji III	Dra. Hj. Nafilah Abdullah, M.Ag	4.

C. Identitas Mahasiswa yang diuji:

1. Nama : M MUJI BUDDIN SM
2. Nomor Induk Mahasiswa : 13540034
3. Program Studi : Sosiologi Agama
4. Semester : IX
5. Program : S1
6. Tanda Tangan (Bukti hadir di Sidang Ujian Tugas Akhir) :

D. Judul Tugas Akhir : AKTIVITAS AMAR MA'RUF NAHI MUNKAR FPI MOJOKERTO

E. Pembimbing/Promotor:

1. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

F. Keputusan Sidang

1. Lulus/~~Tidak lulus~~ dengan perbaikan
2. Predikat Kelulusan
3. Konsultasi Perbaikan a. _____

b. _____

Yogyakarta, 10 November 2017
Ketua Sidang/Pembimbing/Promotor,

Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP. 19720912 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN
PEMIKIRAN ISLAM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156
E-mail: ushuluddin.uin-suka.ac.id Yogyakarta 55281

**SURAT PERINTAH TUGAS RISET
NOMOR :B- 077 /Un.02/DU.I/PG.00/ 05 /2017**

Dekan Fakultas Ushuluddin, dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : M. Muji Buddin SM
NIM : 1340034
Jurusan /Semester : Sosiologi Agama/8
Tempat/Tanggal lahir : Mojokerto, 10-03-195
Alamat Asal : Mojokerto


Diperintahkan untuk melakukan Riset guna penyusunan Skripsi dengan :

Obyek : FPI Mojokerto
Tempat : Mojokerto
Tanggal : 10 Mei s/d 25 Mei
Metode pengumpulan Data : Observasi dan wawancara

Demikianlah diharapkan kepada pihak yang di hubungi oleh Mahasiswa tersebut dapatlah kiranya memberikan bantuan seperlunya.


Yoyakarta, 05 Mei 2017

Yang bertugas


(M. Muji Buddin SM)

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik




H. Fahrudin Faiz

<p style="text-align: center;">Mengetahui</p> <p>Telah tiba di</p> <p>Pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">Kepala</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>	<p style="text-align: center;">Mengetahui</p> <p>Telah tiba di</p> <p>Pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">Kepala</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p>
---	---



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 9 Mei 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4804/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di

SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-077/Un.02/DU/PG.00/05/2017
Tanggal : 5 Mei 2017
Perihal : Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal: "**LOGIKA PARADOKS AKTIVISME FPI DI MOJOKERTO**" kepada :

Nama : M. MUJI BUDDIN SM
NIM : 13540034
No. HP/Identitas : 085730032545 / 3516011003950001
Prodi/Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas/PT : Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 10 Mei 2017 s.d. 25 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
Nomor : 070/ 6639 /209.4/2017

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Kepala Bakesbangpol Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 9 Mei 2017 Nomor : 074/4804/Kesbangpol/2017 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama M. Muji Buddin M

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : M. Muji Buddin M
b. Alamat : Ds. Dukuh Ngarjo, Jatirejo, Mojokerto
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Logika Paradoks Aktivisme FPI di Mojokerto"
b. Tujuan : Permintaan data/skripsi
c. Bidang Penelitian : Sosial & Keagamaan
d. Dosen Pembimbing : Dr. Phil. Al-Makin, P.hD.
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian : Mei 2017
g. Lokasi Penelitian : Kota Mojokerto

Dengan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 12 Mei 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Drs. SUSANTO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19590803 198504 1 012

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbangpol Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

Pedoman Wawancara

“Tindakan dan Varian Radikalisme FPI Mojokerto”

Nama Peneliti : M. Muji Buddin SM

Sekolah : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Bagaimana sejarah terbentuknya FPI Mojokerto?
2. Bagaimana interaksi yang dilakukan oleh FPI Mojokerto dengan ormas lainnya seperti NU yang menjadi basis utama warga Mojokerto?
3. Bagaimana pemahaman FPI Mojokerto tentang anjuran amar ma'ruf dan nahi munkar?
4. Apa saja dalil yang digunakan?
5. Bagaimana para tokoh agama FPI Mojokerto membentuk kepribadian yang kuat mengenai amar ma'ruf dan nahi munkar?
6. Apa saja model gerakan yang dilakukan FPI Mojokerto dalam memberantas kemaksiatan?
7. Jika ada perubahan dalam model gerakan yang dilakukan, apa saja faktor yang mempengaruhinya?
8. Bagaimana respon FPI Mojokerto tentang Perda yang tidak islami?
9. Apakah perlu Perda Mojokerto diganti menjadi Perda Syariah?

Transkrip wawancara

Amar ma'ruf, dibuktikan dengan bakti sosial. Coro anggota fpi bakti sosial ngenteni sampek mantun, misale bangun omah, infrastuktur, tapi selama iki media niku ten mriku enten fpi manggon nang jejer kono sedangkan fpi nang kene.

Lak nek amar makruf disawati berkat nek nahi munkar disawati boto dan musuhe preman. Lwan kita preman. Medan juang fpi itu dakwah hisbah jihad, dakwah nggeh lemah lembut. Nek sampek gepuk-gpukan iku wes notok, la pa petung-petungan media teko, anarkis, radikal. Fpi punya aturan, misale demo, laporan ke atasan.aksi yang dilakukan diikuti oleh jat, majelasi mujahidin jat. rencana ada tiap bulan kali tumpul, damel evaluasi pengurus sambil ngaji. Mangkane niki kulo dadekno ketua panitia, kulo enten rencana kulo pngin fpi dadi organisasi yang, tidak mengkultuskan ora satu, fpi bukan wahabi,

Ngenteki surat ijine entek, kulo nate ten nggene perizinan, takon sak mojkerto kafe sing ijine berlaku ambek sing jek berlaku. Dadakno akeh sing ijine entek ternyata gak ditutup pak lurah diundang semua takon kafe sing ijine wes entek , kok iso ijine wes entek jek buka. nek ijine entek ojo ditambahi yo, mangkane nek milih kepala daerah dee niku nggeh jek misal koyok Masud yunus, dee kan yai, ijin iki duduk jamanku, engkon nek ijine wes entk ga tak perpanjang.

Saiki berjuang dengan elegan, mengevaluasi yang kemarin-kemarin, masio keraso iku yo nek iso ojok gae atribut fpi, kecekel iku ursan dewe.

Waktu niku wonten dukur jembatan, mediasi karo intel jenenge pak agus, Pasar cakar ayam ono nek 100 gae pakaian premen, sing nang jembatan 300 aku pengen ketemu walikota saiki,

Sing arek jas wes siap, jarene saya mencium bau surga pak disana.

Pancasila ditinjau dari syariat islam. Bahkan iku digailih dari alquran, tapi ojo dibajak, koyo pluralisme, pluralisme mencampuradukkan agama. sing bener iku pluralitas, bhinneka tunggal ika. Pancasila dibajak didadeknoo liberal, la nek dasar ketuhanan yang maha esa, la nek undang-undang dilegalkan karo undang-undang pengran gak ngolehi, nek mnuman keras dibolehkan berarti harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dadi ga terus indonesia ga berubah negara islam, buktine pembukanaan undang-undang dasar. Undang-undang dipejuangkan.. undang-undang dibawahnya yang menyahali ketuhanan yang maha esa itu perlu kita benahi,

Undang-undang yang melanggar dasar negara kita ajukan ke pengadilan. Termasuk undang-undang penistaan atau penodaan agama. fpi niku siap tarung undang-undang dasar, aopo ae siap, tarung yo siap.

Lapo FPI iso di terimo nang Kedung Maling Sooko. Soale dakwah sing kita lakukan dengan cara berlaku apik nang kabeh wong. Wong nek apik gak bakal ditakoni apa benderamu. Masio wong Kristen apik sedangkan wong Islam pelit sing bakal dieloki yo wong Kristen



Lampiran 3



Wawancara dengan ketua FPI Mojokerto



Markas FPI Sooko Mojokerto

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : M. Muji Buddin SM
Tempat, Tanggal, Lahir : Mojokerto, 10 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Berat Badan : 52 Kg
Alamat : Pedak Baru, RT 15, RW 07, Desa Karang Bendo, Kec. Bangun Tapan, Kab. Bantul.
Status : Belum Menikah
Handphone : 085730032545/082227056815
Email : Mujibuddin79@gmail.com



Data Pendidikan

Sekolah Dasar : MI Darun Najah Gading, Kec. Jatirejo Mojokerto.
SMP : MTs Al-Amin Mojokerto.
SMA : MA Al-Amin Mojokerto.
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (2013- sekarang).

Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
2. Aktif di komunitas Gus Durian Yogyakarta.
3. Anggota Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga periode 2015-sekarang.
4. Kontributor Islami.co.